

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, makalah yang berjudul "**Peran Media dalam Mengawal Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan**" ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya peran media massa dalam memastikan praktik pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sebagai bagian dari upaya memperkokoh sistem demokrasi di Indonesia.

Dalam proses penyusunan makalah ini, penulis mendapatkan berbagai referensi dari berbagai sumber terpercaya, khususnya sumber online berbahasa Indonesia yang relevan dengan tema pembahasan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan karya di masa yang akan datang. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya dalam memahami pentingnya media sebagai pilar demokrasi dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan	2
BAB II. PEMBAHASAN	3
A. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan	3
B. Peran Media dalam Mengawal Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan.....	6
BAB III. PENUTUP	10
A. KESIMPULAN.	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu fondasi utama dalam pembangunan negara yang demokratis. Transparansi mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kebijakan, anggaran, dan tindakan pemerintah, sementara akuntabilitas mencakup kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil. Dalam kerangka ini, media memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga yang menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat.

Sebagai salah satu pilar demokrasi, media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini publik dan memberikan kontrol terhadap tindakan pemerintah. Media menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat dalam memahami kebijakan-kebijakan publik, terutama dalam hal pengelolaan anggaran negara, alokasi sumber daya, serta implementasi berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, media dapat berfungsi sebagai penjaga dan pengawas, memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Di era digital saat ini, media memiliki peran yang semakin kompleks. Kehadiran media sosial dan platform berita daring membawa perubahan besar dalam cara informasi disebarluaskan. Masyarakat kini tidak hanya mengandalkan media tradisional seperti surat kabar, televisi, dan radio, tetapi juga bergantung pada berita yang tersebar di internet melalui blog, platform media sosial, dan situs berita daring. Meskipun ini mempermudah akses informasi, ada juga tantangan baru seperti penyebaran berita palsu (hoaks) yang dapat merusak kredibilitas informasi yang disampaikan.

Kondisi ini menuntut media untuk lebih berhati-hati dalam menyajikan informasi, memastikan bahwa data yang disampaikan tidak hanya akurat, tetapi juga memadai untuk mengedukasi masyarakat tentang hak mereka dalam mengakses informasi publik. Dalam beberapa kasus, media bahkan harus mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga mendorong pemerintah untuk bertindak lebih bertanggung jawab.

Namun, meskipun media memainkan peran penting ini, mereka juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah terbatasnya akses informasi yang sering kali dilakukan oleh pemerintah atau lembaga negara yang bersangkutan. Terkadang, data yang

dibutuhkan untuk mengungkap kebijakan atau praktik yang kurang transparan sulit diakses oleh media, yang dapat membatasi fungsi mereka sebagai pengawas. Selain itu, ada juga faktor eksternal seperti tekanan politik, kepentingan ekonomi, dan kebijakan sensor yang dapat memengaruhi kebebasan media.

Dalam hal ini, kebebasan pers yang dijamin dalam konstitusi menjadi aspek krusial untuk memastikan bahwa media dapat berfungsi secara optimal. Negara harus memberikan perlindungan terhadap media dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas dan penyebar informasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana media dapat memaksimalkan perannya dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor pemerintahan, serta bagaimana tantangan yang ada dapat diatasi agar pemerintahan yang baik dapat terwujud.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan ?
2. Bagaimana Peran Media dalam Mengawal Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan?

C. TUJUAN

1. Untuk mengetahui Bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan
2. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Media dalam Mengawal Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan

BAB II

PEMBAHASAN

A. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PEMERINTAHAN

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua konsep utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Keduanya saling terkait dan memiliki peran krusial dalam menjaga integritas serta memastikan bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan rakyat. Untuk itu, pemahaman tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan sangat penting bagi masyarakat, lembaga pengawasan, dan tentunya pemerintah itu sendiri.

1. Definisi Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dalam pemerintahan merujuk pada sejauh mana pemerintah memberikan akses informasi kepada publik mengenai kebijakan, anggaran, serta program-program yang dijalankan. Pemerintah yang transparan memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara jelas bagaimana kebijakan diterapkan, dari mana dana diperoleh, dan bagaimana dana tersebut digunakan. Transparansi mendorong publik untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan mencegah tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan kepentingan umum.

Akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, tindakan, dan keputusan yang mereka buat. Sebuah pemerintahan yang akuntabel harus siap menerima evaluasi dari masyarakat atau lembaga pengawasan lainnya. Akuntabilitas mencakup kewajiban untuk bertanggung jawab atas hasil yang dicapai dan menjelaskan jika terdapat kegagalan atau kesalahan dalam implementasi kebijakan.

2. Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan

Kedua prinsip ini menjadi pilar utama dalam mewujudkan **good governance**, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Secara lebih mendalam, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepercayaan Publik

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat bergantung pada seberapa transparan dan akuntabel pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Ketika publik merasa bahwa pemerintah terbuka mengenai kebijakan dan pengelolaan sumber daya, mereka cenderung lebih percaya dan mendukung kebijakan yang diterapkan. Tanpa

transparansi, pemerintah bisa kehilangan kepercayaan masyarakat, yang dapat berdampak pada kestabilan politik dan sosial.

2. Mencegah Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang alokasi anggaran dan pelaksanaan program-program pemerintah. Dengan adanya pengawasan dari media dan masyarakat, potensi korupsi dapat dikurangi. Akuntabilitas menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, mencegah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

3. Mendorong Partisipasi Masyarakat

Salah satu keuntungan utama dari transparansi adalah membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Ketika masyarakat dapat mengakses informasi tentang rencana dan kebijakan pemerintah, mereka dapat memberikan masukan, mengajukan kritik, atau bahkan berkolaborasi dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Ini menghasilkan kebijakan yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. Meningkatkan Efisiensi Pemerintahan

Transparansi dan akuntabilitas juga mempengaruhi efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan program pemerintah. Ketika pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan implementasi kebijakan, mereka akan lebih berhati-hati dan lebih terorganisir dalam merencanakan serta melaksanakan program-program tersebut. Hal ini mengurangi pemborosan anggaran dan meningkatkan hasil yang dapat dicapai.

3. Mekanisme Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas

Untuk dapat diwujudkan dalam praktik, transparansi dan akuntabilitas memerlukan beberapa mekanisme dan instrumen yang mendukung, antara lain:

1. Akses Informasi Publik

Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik di banyak negara (termasuk Indonesia) memberikan dasar hukum yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan tindakan pemerintah. Akses ini mencakup informasi tentang penggunaan anggaran, proyek-proyek pemerintah, serta peraturan-peraturan yang dihasilkan oleh lembaga negara.

2. Pengawasan dan Evaluasi

Organisasi non-pemerintah, lembaga pengawas, dan media massa memiliki peran dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan. Lembaga-lembaga ini bertugas untuk mengungkapkan ketidaksesuaian antara kebijakan yang dijalankan dengan harapan masyarakat. Selain itu, lembaga pengawasan internal pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga berperan dalam melakukan audit terhadap penggunaan anggaran negara.

3. Penguatan Peran Media

Media memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Media bukan hanya sebagai penyampai informasi tetapi juga sebagai kontrol sosial yang mengawasi jalannya pemerintahan. Media yang kritis dapat membantu publik untuk memahami kebijakan yang diambil dan memberikan ruang untuk masukan serta kritik terhadap kebijakan tersebut.

4. Pendidikan dan Sosialisasi Publik

Agar transparansi dan akuntabilitas dapat berjalan dengan baik, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses tersebut melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai hak mereka dalam mengakses informasi publik. Masyarakat yang sadar akan haknya cenderung lebih aktif dalam mengawal kebijakan yang diterapkan pemerintah.

4. Hambatan dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas

Meskipun penting, penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan sering menghadapi berbagai hambatan, antara lain:

1. Birokrasi yang Kompleks

Proses administratif yang rumit dan lambat dapat menghambat penyampaian informasi yang tepat waktu kepada publik. Selain itu, ketidakefektifan dalam manajemen data dan pengelolaan informasi juga dapat menjadi kendala dalam mencapai transparansi.

2. Korupsi dan Konflik Kepentingan

Praktik korupsi yang merajalela dalam beberapa bagian pemerintahan menjadi tantangan besar dalam mewujudkan akuntabilitas. Penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan dapat menyebabkan kebijakan yang tidak adil dan tidak berpihak pada rakyat.

3. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Dalam beberapa kasus, masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pentingnya partisipasi dalam pengawasan kebijakan pemerintah. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai hak untuk mengakses informasi dan keterbatasan sarana untuk mengajukan kritik terhadap kebijakan.

4. **Kontrol Pemerintah terhadap Media**

Di beberapa negara, media yang mengkritik pemerintah dapat menghadapi tekanan politik atau ekonomi, yang mengurangi independensi mereka. Kondisi ini membatasi kemampuan media untuk melakukan pengawasan dan mendorong akuntabilitas yang lebih besar dalam pemerintahan.

B. PERAN MEDIA DALAM MENGAWAL TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN

Media, sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam sistem sosial dan politik, memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi dan mengawal transparansi serta akuntabilitas pemerintah. Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh media sangat krusial dalam memastikan bahwa pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks pemerintahan modern, media bukan hanya berfungsi sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai lembaga kontrol sosial yang dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan pemerintah.

1. Fungsi Media dalam Pengawasan Pemerintahan

Secara umum, media memiliki beberapa fungsi utama dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, antara lain:

1. **Sebagai Penyampai Informasi**

Media bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada publik mengenai kebijakan pemerintah, penggunaan anggaran negara, dan pelaksanaan program-program pemerintahan. Dengan memberikan informasi yang terbuka, media memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada.

2. **Sebagai Alat Pengawasan (Watchdog)**

Salah satu peran paling penting media adalah sebagai **watchdog** atau pengawas terhadap pemerintah. Media memiliki kemampuan untuk mengungkapkan kebijakan yang merugikan rakyat, tindakan korupsi, atau kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dengan melakukan investigasi dan pelaporan yang mendalam, media dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

3. **Mendorong Partisipasi Publik**

Media memiliki peran besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka dan kewajiban pemerintah terhadap rakyat. Melalui pemberitaan yang berfokus pada keterlibatan publik, media dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

4. **Menjadi Saluran Kritik dan Opini Publik**

Media berfungsi sebagai saluran bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat, kritik, dan masukan terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah. Dengan menyalurkan aspirasi masyarakat, media tidak hanya memberikan ruang untuk penyampaian keluhan tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menilai kebijakan dari sudut pandang publik.

2. **Media sebagai Alat Pengawasan Pemerintah**

Media, baik itu media massa tradisional (seperti surat kabar, televisi, dan radio) maupun media baru (seperti situs web dan platform media sosial), memiliki peran penting dalam proses pengawasan pemerintahan. Berikut adalah beberapa cara di mana media dapat berfungsi sebagai alat pengawasan yang efektif:

1. **Investigasi Jurnalistik**

Media memiliki kemampuan untuk melakukan **investigasi jurnalistik**, yaitu mengungkap fakta-fakta tersembunyi terkait kebijakan atau tindakan pemerintah yang tidak transparan. Investigasi semacam ini sering kali mengarah pada penemuan kasus-kasus korupsi, penyalahgunaan anggaran, atau kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Sebagai contoh, dalam banyak kasus korupsi besar, media memainkan peran utama dalam menggali informasi dan mengungkapkannya ke publik, yang kemudian mendorong tindakan hukum atau perubahan kebijakan.

2. **Penyampaian Data dan Statistik**

Media juga bertugas untuk menyampaikan data dan statistik secara jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Dalam hal anggaran negara, misalnya, media dapat membantu menjelaskan alokasi anggaran, bagaimana dana tersebut digunakan, serta hasil yang dicapai dari program-program pemerintah. Informasi semacam ini penting agar publik dapat menilai apakah pemerintah sudah menjalankan tugasnya secara efisien dan akuntabel.

3. **Pemberitaan Kritis**

Media yang kritis terhadap kebijakan pemerintah sangat penting untuk menjaga keseimbangan dalam pengambilan keputusan politik. Pemberitaan yang menyoroti kebijakan yang merugikan rakyat atau tidak sesuai dengan janji politik dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Media harus berani menyoroti kekurangan dalam kebijakan dan memberi ruang untuk diskusi terbuka mengenai bagaimana kebijakan tersebut dapat diperbaiki.

3. Media dan Peranannya dalam Meningkatkan Transparansi

Transparansi adalah syarat utama bagi terciptanya pemerintahan yang baik dan dapat dipercaya. Media memiliki beberapa peran utama dalam meningkatkan transparansi pemerintahan:

1. Menyediakan Akses Informasi yang Luas

Media berperan dalam menyediakan informasi yang dapat diakses oleh publik mengenai kebijakan pemerintah dan pelaksanaan program-programnya. Dengan memberikan laporan yang jelas mengenai anggaran, pelaksanaan proyek, dan hasil yang diperoleh, media memastikan bahwa pemerintah tidak menyembunyikan informasi penting yang seharusnya diketahui oleh publik.

2. Mengurangi Kesenjangan Informasi

Salah satu tantangan besar dalam pemerintahan adalah adanya kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Media membantu menjembatani kesenjangan ini dengan menyediakan platform untuk penyebaran informasi yang luas dan merata. Hal ini memungkinkan masyarakat dari berbagai lapisan untuk mendapatkan pemahaman yang sama tentang kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

3. Mengawasi Kinerja Pemerintah Secara Berkelanjutan

Media juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah secara berkelanjutan. Dengan memantau pelaksanaan program-program pemerintah dari waktu ke waktu, media dapat mengungkapkan masalah yang timbul dan mengingatkan pemerintah untuk tetap berada pada jalur yang benar dalam menjalankan program-program mereka.

4. Hambatan dalam Peran Media

Meskipun media memiliki peran yang sangat penting dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, beberapa hambatan dapat mengurangi efektivitas peran media tersebut:

1. Keterbatasan Akses Informasi

Di beberapa negara atau wilayah, akses media terhadap informasi pemerintah masih terbatas. Pemerintah seringkali menghalangi atau membatasi akses media terhadap dokumen atau data yang penting, yang pada akhirnya menghambat transparansi.

2. Kontrol Politik terhadap Media

Di beberapa negara, terutama di negara dengan sistem pemerintahan otoriter, media sering kali berada di bawah kontrol pemerintah atau pemodal besar yang memiliki kepentingan politik. Hal ini dapat mengurangi objektivitas dan independensi media dalam mengkritik kebijakan pemerintah.

3. Kurangnya Sumber Daya

Tidak semua media memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan investigasi yang mendalam atau memproduksi liputan yang komprehensif mengenai kebijakan pemerintah. Terutama bagi media lokal atau kecil, keterbatasan dana dan tenaga sering kali menjadi kendala dalam melaksanakan peran pengawasan.

5. Peran Media Sosial dalam Pengawasan Pemerintahan

Media sosial telah menjadi platform yang sangat penting dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dengan penggunaannya yang luas, media sosial memungkinkan masyarakat untuk langsung berinteraksi dengan pemerintah dan memberikan feedback secara langsung. Media sosial juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyebarkan informasi, mengkritik kebijakan, atau mengungkapkan ketidakpuasan terhadap pemerintahan. Dalam hal ini, media sosial memberikan dimensi baru dalam kontrol sosial yang lebih partisipatif dan demokratis.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Media massa memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Sebagai pilar keempat demokrasi, media bertindak sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, serta penggunaan sumber daya publik dapat diakses secara luas. Dengan fungsi pengawasan yang dilaksanakan secara profesional dan independen, media membantu mengungkap penyimpangan, korupsi, dan praktik pemerintahan yang tidak akuntabel, sehingga mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih bersih dan bertanggung jawab.

Untuk memperkuat peran ini, berbagai upaya perlu terus dilakukan, antara lain: meningkatkan independensi media dari intervensi politik dan kepentingan ekonomi; memperkuat kapasitas jurnalistik investigatif; menjamin keterbukaan informasi publik; memanfaatkan teknologi dan media sosial secara efektif; serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. Dengan ekosistem media yang sehat, didukung oleh kerangka hukum yang melindungi kebebasan pers, pemerintahan yang transparan dan akuntabel dapat lebih mudah diwujudkan, sekaligus memperkuat fondasi demokrasi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, E. (2014). *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. Diakses dari <https://www.simbiosarekatama.com/komunikasi-massa>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2022). *Transparansi dan Akuntabilitas: Pilar Utama Tata Kelola Pemerintahan*. Diakses dari <https://www.bpkp.go.id/berita/read/Transparansi-dan-Akuntabilitas>
- Dewan Pers. (2020). *Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia 2020*. Jakarta: Dewan Pers. Diakses dari <https://dewanpers.or.id/assets/docs/IKP2020.pdf>
- Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. (2021). *Hak Atas Informasi Publik dalam Negara Demokrasi*. Diakses dari <https://www.komisiinformasi.go.id>
- Purwanto, E. A. (2017). *Peran Media Massa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 150–162. Diakses dari <https://journal.unair.ac.id/JAP@peran-media-dalam-akuntabilitas-pemda>
- Setiawan, A. (2021). *Menguatkan Fungsi Media Sebagai Pengawas Pemerintah di Era Digital*. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/36000>
- Yuliarti, M. (2016). *Media Massa dan Demokrasi: Keterkaitan antara Kebebasan Pers dan Akuntabilitas Pemerintah*. Jakarta: LP3ES. Diakses dari <https://lp3es.or.id/publikasi/media-massa-dan-demokrasi>